

**LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN TINGGI GORONTALO
TRIWULAN II TAHUN 2025
Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi
Nomor 04 Tahun 2023
DI PENGADILAN TINGGI GORONTALO**



**Disahkan di Gorontalo
Pada Hari Selasa 01 Juli 2025**

Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo

Dr. YAPI, S.H., M.H.

Pengarah,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Enda Annatje Maukar'.

Enda Annatje Maukar, S.H., M.H.

Ketua Tim Survei

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Masdin Daliuwa'.

Masdin Daliuwa, SH.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Pelayanan Publik (*Public Service*) oleh Birokrasi merupakan salah satu perwujudan dan fungsi Aparatur Negara sebagai Abdi Masyarakat disamping sebagai Abdi Negara. Pelayanan Publik oleh Birokrasi dimaksudkan untuk menyejahterakan masyarakat. Dengan demikian Pelayanan Publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah diterapkan.

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan publik oleh setiap instansi pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. Seluruh pendekatan yang digunakan selama ini dalam upaya perbaikan pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sesuai penyedia layanan semata-mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan.

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan survei ini. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang Pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas.

Pelaksanaan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan Saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga Laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Gorontalo, 1 Juli 2025

Tim Survei

DAFTAR ISI

BAB I	1
KUESIONER SURVEI	1
1.1. Kuesiner Survei.....	1
BAB II	5
METODOLOGI SURVEI	5
2.1. Kriteria Responden.....	5
2.2. Metode Penelitian.....	5
2.3. Metode Pengolahan Data dan Analisis.....	5
BAB III	8
PENGOLAHAN SURVEI	8
3.1. Analisis Hasil Survei.....	8
3.2. Evaluasi Hasil Survey.....	22
3.3. Tindak Lanjut Hasil Survei	23
BAB IV	24
DATA SURVEI	24
4.1. Data Responden.....	24
4.2. Data Dukung Lainnya.....	27

BAB I

KUESIONER SURVEI

1.1. Kuisisioner Survei

Kebijakan pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat unit/satuan kerja bertujuan untuk menemukan model praktik terbaik (*best practices*) dari unit/satuan kerja yang berhasil mendapatkan predikat menuju WBK/WBBM agar dapat dijadikan contoh bagi unit/satuan kerja lain. Oleh sebab itu, fokus pembangunan ZI tertuju pada dua sasaran utama, yaitu terwujudnya pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta kualitas pelayanan publik yang prima. Pencapaian sasaran tersebut diukur melalui komponen pengungkit terhadap 6 (enam) area perubahan dan komponen hasil melalui Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) dan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP).

Disamping itu, melihat dinamika dan perkembangan ZI pada instansi pemerintah, maka perlu dilakukan ulang terkait pembatasan kuota dan penyelenggaraan survei. Sejalan dengan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, SPAK dan SPKP dilakukan terhadap pengguna layanan (pemangku kepentingan) dari unit/satuan kerja Instansi Pemerintah. Selama ini kedua survei tersebut tidak hanya diselenggarakan oleh instansi pemerintah/unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI, namun juga dilakukan oleh Tim Penilai (TPN) sebagai rangkaian proses evaluasi ZI. Proses yang berulang dipandang kurang efisien dan efektif sehingga perlu dilakukan simplifikasi pelaksanaan survei yang dilakukan secara mandiri oleh unit/satuan kerja yang sedang melakukan pembangunan ZI atau unit lain yang ditunjuk instansi pemerintah.

Dengan adanya Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 04 Tahun 2023 tentang pengusulan dan Evaluasi Zona Integritas, yang menyatakan bahwa setiap satuan kerja yang akan diusulkan pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju WBK/WBBM wajib melaksanakan survey mandiri yang terdiri dari Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) dan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK), maka dengan demikian laporan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ini ada.

Dalam pelaksanaan Survei mandiri Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo kepada pengguna layanan, kuesioner yang disusun ini mengacu pada pedoman dari Kementrian PAN-RB. Adapun Kuisisioner Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) yang dibagikan ke responden adalah sebagai berikut:

1. Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini?
 - Seluruh petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Sebagian kecil besar petugas pada pengadilan tidak pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
 - Seluruh petugas pada pengadilan pernah memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya
2. Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini?
 - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian besar pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian kecil pelayanan yang diberikan oleh petugas sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Seluruh pelayanan yang diberikan oleh petugas tidak sesuai dengan syarat/prosedur/ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan

3. Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan
 - Petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas, dll) diluar ketentuan yang ditetapkan oleh pengadilan
 - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah menerima/bahkan meminta imbalan (uang, barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Petugas pelayanan sering menerima/bahkan meminta imbalan (uang barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan
 - Petugas pelayanan selalu menerima/bahkan meminta imbalan (uang barang, fasilitas dll) diluar ketentuan yang telah ditetapkan oleh pengadilan.
4. Apakah tidak ada pungutan liar seperti permintaan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi pada unit layanan ini?
 - Petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
 - Sebagian besar petugas layanan tidak pernah meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
 - Sebagian besar petugas layanan sering meminta pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)
 - Sebagian besar petugas layanan selalu meminta imbalan pembayaran atas layanan yang diterima pengguna layanan diluar tarif resmi seperti (Uang rokok, uang terima kasih, dll)

5. Apakah tidak ada praktek percaloan/perantara yang tidak resmi yang diterapkan pada unit layanan ini?
- Seluruh petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Sebagian besar petugas pelayanan tidak pernah melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Petugas pelayanan sering melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan
 - Petugas layanan selalu melakukan praktek percaloan/perantara tidak resmi pada unit layanan di pengadilan



BAB II METODOLOGI SURVEI

2.1. Kriteria Responden

Pelaksanaan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan ini dilakukan terhadap responden yang menggunakan layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo. Para responden mengisi Survei Persepsi Kualitas Pelayanan melalui aplikasi siSUPER pada link : http://bit.ly/survey_ptgto Setelah dilaksanakan penelitian di dapat sample sebanyak 30 (tiga puluh) Responden yang mengguna layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo periode April-Juni Tahun 2025.

2.2. Metode Penelitian

Lokasi Survei adalah tempat dimana petugas melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data survei yang akurat, dalam hal ini yaitu Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.3. Metode Pengolahan data Analisis

Analisis data untuk menentukan Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan menggunakan teknik statistik dekriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala 1-4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi yang mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih korupsi.

Dalam persepsi kualitas pelayanan disajikan dalam bentuk *scoring*/angka absolute agar diketahui peningkatan/penurunan indeks persepsi kualitas pelayanan masyarakat atas pelayanan yang diberikan. Teknik analisis perhitungan indeks persepsi kualitas pelayanan pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. Kedua, mencari bobot rata-rata setiap indikator. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1-4 yang kemudian konversikan ke

angka 0-100. Skala indeks persepsi antara 1-4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi kualitas Pelayanan Publik yang Prima.

Kegiatan Pengumpulan data Kuesioner diawasi oleh Ketua Team Survei Pelayanan Yaitu **Masdin Daliuwa,S.H.** (Panmud Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo) Ketua Team survei akan mengecek kerja petugas pelaksana dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Tinggi Gorontalo.

Adapun Proses Pelaksanaan Pengumpulan data dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- Responden yang telah selesai menerima layanan pada Pengadilan Tinggi Gorontalo diarahkan untuk mengisi survei secara elektronik melalui Aplikasi SISUPER BADILUM yang terletak di area PTSP Atau Melalui Handphone sendiri melalui Barcode yang ada tersedia di Meja PTSP Pengadilan Tinggi Gorontalo atau melalui alamat: http://bit.ly/survey_ptgto
- Isian data terhadap 5 (Lima) unsur pertanyaan yang telah ditetapkan didalam elektronik kuesioner (e-survey).
- Hasil dari pengisian kuesioner yang dilaksanakan melalui aplikasi SISUPER BADILUM Kemudian dianalisa by Sistem melalui aplikasi SISUPER Badan Peradilan umum Mahkamah Agung RI.
- Data Pendapat Responden yang terisi dalam kuesioner online kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan Umur, Jenis Kelamin, Pendidikan dan Pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

Setelah data terkumpul pada penelitian ini disusun dalam bentuk diagram frekuensi dan dianalisis dengan analisis statistik deskriptif.

selanjutnya disusun ke dalam kuesioner dalam 5 item, dengan 4 opsi jawaban.

Adapun penskorannya menggunakan skala likert, dengan skor 1 sampai 4.

Tabel 1
Ruang Lingkup Survei Persepsi Anti Korupsi

No.	Ruang Lingkup
1	Tindakan diskriminasi
2	Indikasi kecurangan pelayanan
3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku
4	Praktik pungutan liar
5	Praktik percaloan

Tabel 2
KATEGORI MUTU PELAYANAN

NO	Mutu Pelayanan	Norma Skor	
		Skala 100	Skala 1-4
1	A (Sangat Baik)	88,31-100,00	3,5323-4,00
2	B (Baik)	76,61-88,30	3,0644-3,532
3	C (Kurang Baik)	65,00-76,60	2,60-3,064
4	D (Tidak Baik)	25,00-64,99	1,00-2,5996

BAB III PENGOLAHAN SURVEI

3.1. Analisis Hasil Survey

3.1.1. Indikator Tindakan Diskriminasi

Indikator tindakan diskriminasi disampaikan untuk melihat apakah ada petugas yang memberikan pelayanan secara khusus atau membeda-bedakan pelayanan karena faktor suku, agama, kekerabatan, almamater dan sejenisnya. Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator tindakan diskriminasi ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 1
Indeks Tindakan Diskriminasi

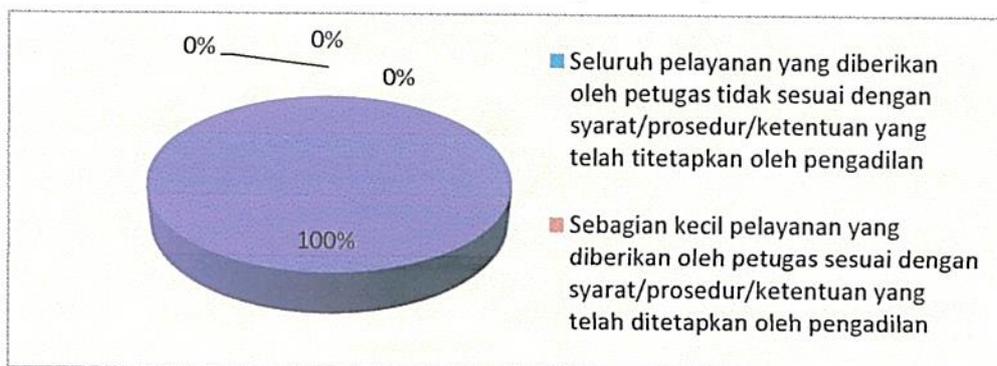


3.1.2. Indikasi Kecurangan Pelayanan

Indikator Indikasi kecurangan pelayanan ini untuk melihat apakah ada petugas yang memberikan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan sehingga mengindikasikan kecurangan seperti penyerobotan antrian, mempersingkat waktu tunggu layanan di luar prosedur, pengurangan syarat/prosedur, pengurangan denda, dll. Dari skala 1-4 indikator Indikasi kecurangan pelayanan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 2

Indeks Indikasi Kecurangan Pelayanan

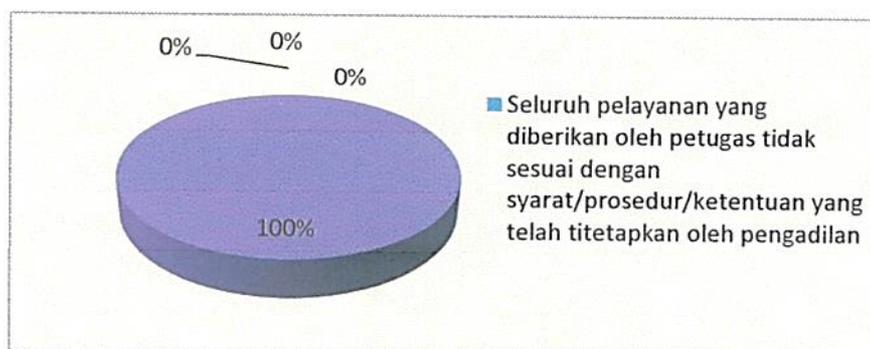


3.1.3. Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku

Indikator pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku ini untuk mengetahui apakah petugas yang menerima/bahkan meminta imbalan uang untuk alasan administrasi, transport, rokok, kopi, dll di luar ketentuan, pemberian imbalan barang berupa makanan jadi, rokok, parcel, perhiasan, elektronik, pakaian, bahan pangan, dll diluar ketentuan, pemebrian imbalan fasilitas berupa akomodasi (hotel, resort perjalanan/jasa transport, komunikasi, hiburan, voucher belanja, dll) diluar ketentuan. Dari skala 1-4 indikator pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 3

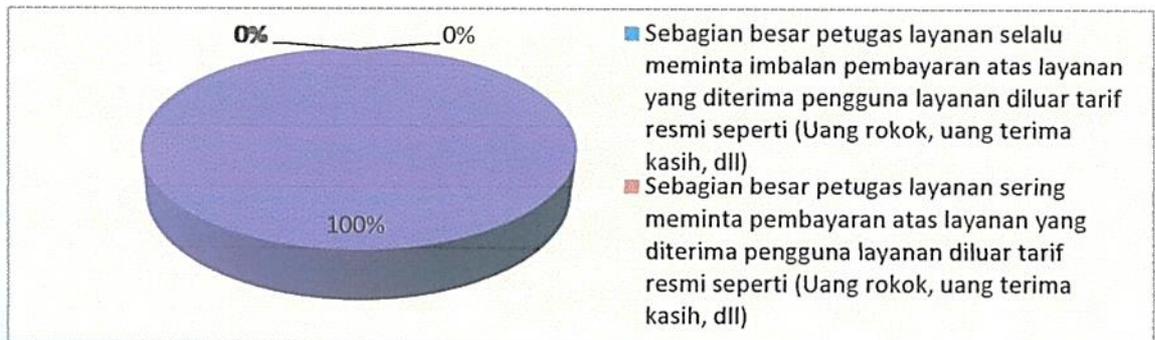
Indeks Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku



3.1.4. Praktik Pungutan Liar

Indikator praktik pungutan liar untuk mengetahui apakah ada petugas yang melakukan pungli, yaitu permintaan pembayaran atas pelayanan yang diterima pengguna layanan di luar tarif resmi. Dari skala 1-4 indikator praktik pungutan liar ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**

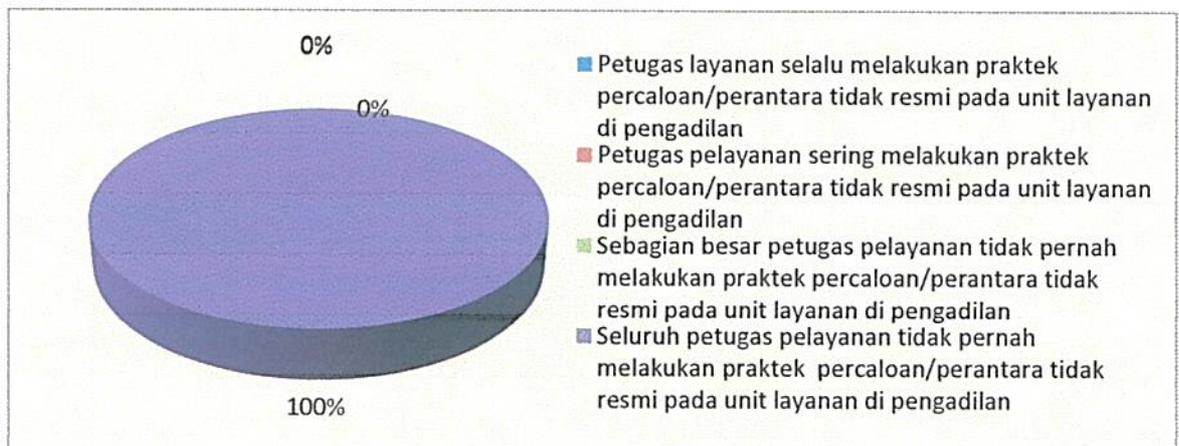
Grafik 4
Indeks Praktik Pungutan Liar



3.1.5. Praktik Percaloan

Indikator praktik percaloan ini untuk melihat apakah ada praktik percaloan (pihak yang melakukan percaloan dapat berasal dari oknum pegawai pada unit layanan ini, maupun pihak luar yang memiliki hubungan/ atau tidak memiliki hubungan dengan oknum pegawai. Dari skala 1-4 indikator praktik percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks **4,00 (Empat Koma Nol)**.

Grafik 5
Indeks Praktik Percaloan



Dari 5 indeks indikator di atas, maka diperoleh hasil Indeks Persepsi Anti Korupsi Pengadilan Tinggi Gorontalo sebesar **4,00** (empat Koma Nol). Jika dikonversikan menjadi **100,00** (Seratus Persen) Hal tersebut mengindikasikan bahwa persepsi kualitas persepsi anti korupsi di Pengadilan Tinggi Gorontalo adalah Pemerintah yang Bersih dan Akuntabel

Tabel 3

Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Pengadilan Tinggi Gorontalo

No.	Ruang Lingkup	Nilai
1	Tindakan diskriminasi	4,00
2	Indikasi kecurangan pelayanan	4,00
3	Pemberian imbalan diluar ketentuan yang berlaku	4,00
4	Praktik pungutan liar	4,00
5	Praktik percaloan	4,00

3.2. Evaluasi Hasil Survey

Merujuk pada hasil indeks persepsi kualitas pelayanan setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk tersebut di atas, menunjukkan tiga indikator tertinggi dan terendah,

Tertinggi

1. Tindakan diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	120
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	120
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	120

Terendah

1. Tindakan Diskriminasi
2. Indikasi Kecurangan
3. Pemberian Imbalan

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah		3 Unsur Tertinggi
No.	Unsur	Nil
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	12%
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/kesentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	12%
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar kesentuan yang berlaku pada pengadilan ?	12%

Adapun tindak lanjut perbaikan atas 3 unsur terendah adalah sebagai berikut:

1. Tindakan Diskriminasi

Untuk indikator ini sudah berada dikatagori sangat baik, Pimpinan selalu memberikan pembinaan kepada petugas PTSP untuk menghormati dan menghargai setiap tamu yang berkunjung tanpa membeda-bedakan dalam memberikan Pelayanan.

2. Indikasi Kecurangan,

Untuk indikator ini sudah berada dikatagori sangat baik Pimpinan selalu memberikan pembinaan kepada petugas PTSP jika dalam memberikan pelayanan terdapat kecurangan maka akan diberikan sanksi Tegas terhadap petugas tersebut.

3. Pemberian Imbalan,

Untuk Indikator ini petugas PTSP selalu diberikan pembinaan dan arahan berupa brifing Kepada Petugas agar selalu menjaga integritas Pengadilan Tinggi Gorontalo dengan tidak menerima pemberian dari pihak agar melayani dengan ikhlas dan tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun dalam memberikan pelayanan kepada pihak informasi.

3.3 . Tindak Lanjut Hasil Survey

Adapun tindak lanjut Hasil terhadap hasil Survey Indeks Persepsi Anti Korupsi 3 (tiga) nilai terendah adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP memberikan Pembinaan terhadap para Petugas layanan agar senantiasa memberikan layanan sesuai dengan Prosedur yang berlaku tanpa memandang suku, agama, maupun Faktor kekerabatan/kekeluargaan antara Petugas layanan dengan Pengguna Layanan.
2. Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP meningkatkan Pengawasan terhadap penerapan Nomor antrian layanan sesuai dengan nomor antrian kedatangan sesuai dengan nomor antrian yang telah disediakan di ruang PTSP sehingga Penerima layanan tidak merasa di curangi dalam menerima layanan.
3. Pimpinan dan Pejabat Pengelola dan Penanggung Jawab PTSP selalu memberikan arahan melalui Briping atau pun rapat dinas guna mengingatkan kepada petugas pemberi layanan untuk menjunjung tinggi nilai integritas dalam memberi layanan serta menolak setiap pemberian imbalan dalam bentuk apapun dalam pemberian layanan kepada penerima layanan.

BAB IV DATA SURVEI

4.1. Data Responden

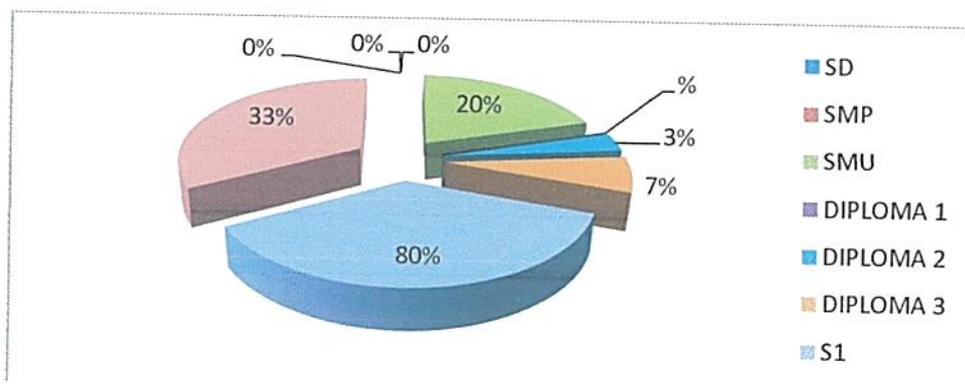
4.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik pendidikan terakhir dibawah, mayoritas adalah S1 dengan jumlah 11 responden.

**Tabel 4
RESPONDEN BERDASARKAN PENDIDIKAN**

PENDIDIKAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
SD	0	0%
SMP	0	0%
SMU	6	20%
DIPLOMA 1	0	0%
DIPLOMA 2	1	3%
DIPLOMA 3	2	7%
S1	11	37%
S2	10	33%
S3	0	0%
TOTAL	30	100%

**GRAFIK 11
DATA PENDIDIKAN RESPONDEN**



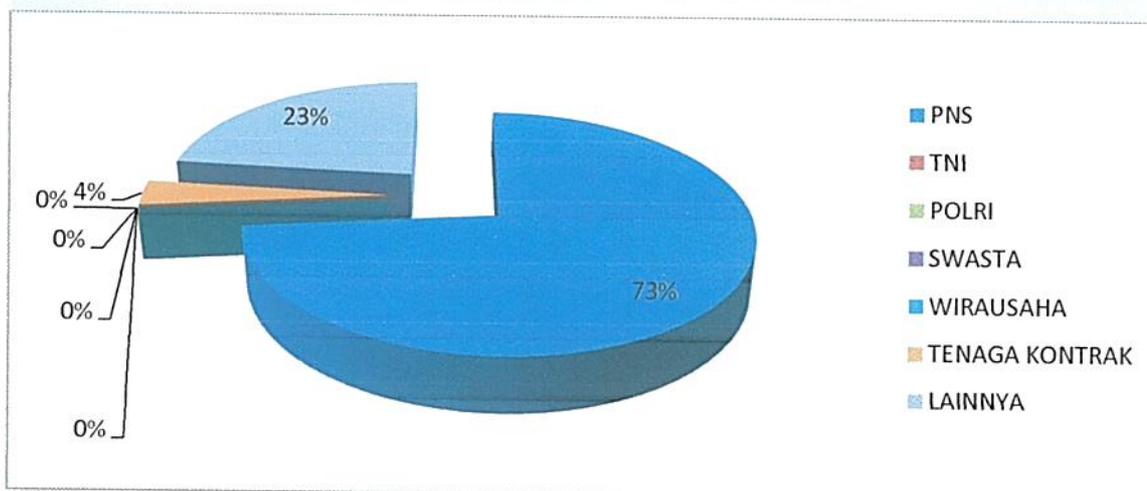
4.1.2. Pekerjaan Utama Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik Pekerjaan Utama dibawah, mayoritas adalah PNS dengan jumlah 22 responden.

Tabel 5
RESPONDEN BERDASARKAN PEKERJAAN UTAMA

PEKERJAAN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
PNS	22	73%
TNI	0	0%
POLRI	0	0%
SWASTA	0	0%
WIRUSAHA	0	0%
TENAGA KONTRAK	1	3%
LAINNYA	7	23%
TOTAL	30	100%

GRAFIK 12
DATA PEKERJAAN UTAMA RESPONDEN



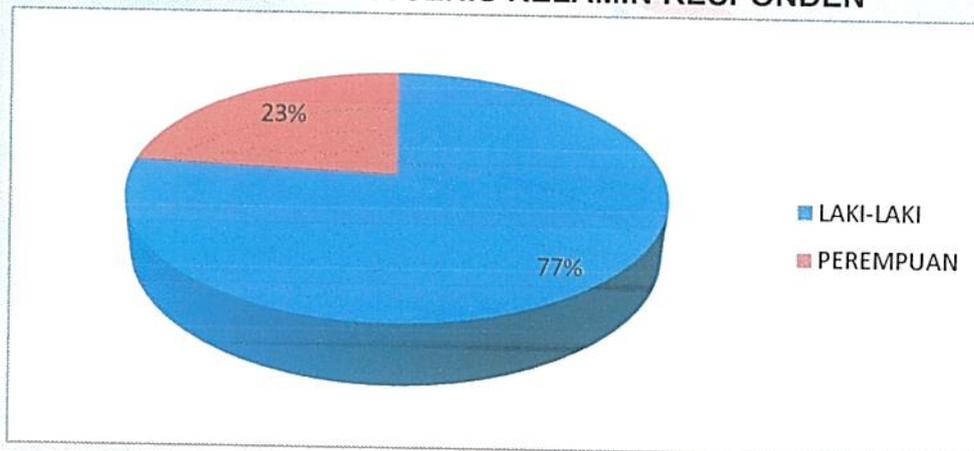
4.1.3. Jenis Kelamin Responden

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik jenis kelamin laki-laki dengan jumlah 23 responden dan kelamin perempuan dengan jumlah 7 responden

Tabel 6
RESPONDEN BERDASARKAN JENIS KELAMIN

JENIS KELAMIN	JUMLAH RESPONDEN	PERSENTASE
LAKI-LAKI	23	77%
PEREMPUAN	7	23%
TOTAL	30	100%

GRAFIK 13
DATA JENIS KELAMIN RESPONDEN



4.2. Data Dukung Lainnya

4.2.1. Indeks Total

Indeks Total	Data Umum Responden	Data Demografi Responden	Data Umur Responden	Data Layanan	Nilai Per Umur
ZI - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN TINGGI GORONTALO NILAI INDEKS 4,00 / 100,00 % Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025	JUMLAH	30 RESPONDEN			
	JENIS KELAMIN	LAKI-LAKI : 23 ORANG PEREMPUAN : 7 ORANG			
	PENDIDIKAN	Tidak / Belum Sekolah : 0 ORG Diploma 2 : 1 ORG SD : 0 ORG Diploma 3 : 2 ORG SMP : 0 ORG S1 : 11 ORG SMU : 6 ORG S2 : 10 ORG Diploma 1 : 0 ORG S3 : 0 ORG			
	PEKERJAAN	PNS : 22 ORG TNI : 0 ORG POLRI : 0 ORG SWASTA : 0 ORG LAINNYA : 7 ORG WIRUSAHA : 0 ORG TENAGA KONTRAK : 1 ORG			

4.2.2. Data Domisili Responden

Daerah Domisili		Jumlah (Orang)
1	NUSA TENGGARA BARAT	1
2	GORONTALO	29

4.2.3. Data Umur Responden

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	7	23.33
29 - 39 Th	11	35.33
40 - 49 Th	10	32.33
50 - 59 Th	1	3.33
60 - 69 Th	1	3.33
Total	30	

4.2.4. Data Layanan

Layanan	Jumlah (Orang)
1 Layanan Hukum / Informasi	15
2 Layanan Administrasi Umum	14
3 Layanan e-Court	1

4.2.5. Nilai Per Unsur

Deskripsi	Nilai Per Unsur					Keterangan
	U1	U2	U3	U4	U5	
Jumlah	120	120	120	120	120	
NRR Per RL	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	20.000
NRR Terimbang	0.800	0.800	0.800	0.800	0.800	4.000
IPAK ZI Unit Pelayanan						100.00

4.2.6. Tiga Unsur Terendah

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	120
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	120
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	120

4.2.7. Tiga Unsur Tertinggi

EVALUASI NILAI UNSUR		
3 Unsur Terendah	3 Unsur Tertinggi	
No.	Unsur	Nilai
1	Apakah tidak ada diskriminasi pada pelayanan yang disampaikan pada unit layanan ini ?	120
2	Apakah tidak ada pelayanan diluar prosedur/ketentuan yang terindikasi kecurangan pada unit layanan ini ?	120
3	Apakah tidak ada penerimaan imbalan berupa uang/barang/fasilitas diluar ketentuan yang berlaku pada pengadilan ?	120

4.2.8. Data Umum Responden

1	Sepeti Djarif S. Pd R-064539-ZI-IPAK-ED73F82F3F No. HP : 085268942567	GORONTALO	27 Tahun Perempuan	S1 PNS	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
2	MUHAMMAD RIDWAN (PT CAKRAJUBILA HOP-2011) R-064539-ZI-IPAK-02A05A176 No. HP : 082111865153	NUSA TENGGARA BARAT	29 Tahun Laki-laki	SMA LAINNYA	4	4	4	4	4	19 Juni 2025
3	Meliza Herman R-064539-ZI-IPAK-8CDEDA9203 No. HP : 8068697167	GORONTALO	28 Tahun Perempuan	S1 PNS	4	4	4	4	4	3 Juni 2025
4	Novita M. Dg. Rsp. S. H. R-064539-ZI-IPAK-FF8EC5695F No. HP : 082194386225	GORONTALO	41 Tahun Perempuan	S1 PNS	4	4	4	4	4	3 Juni 2025
5	Yunangsi Kasim R-064539-ZI-IPAK-6C3F18749A No. HP : 081245468083	GORONTALO	44 Tahun Perempuan	S1 PNS	4	4	4	4	4	7 Mei 2025
6	Amran R-064539-ZI-IPAK-8CF8EC3EAD No. HP : 81340050005	GORONTALO	41 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	6 Mei 2025
7	F R-064539-ZI-IPAK-8D617FCCCC No. HP : 81243656470	GORONTALO	39 Tahun Laki-laki	Diploma 2 PNS	4	4	4	4	4	6 Mei 2025
8	Supardi R-064539-ZI-IPAK-2978F91614 No. HP : 81222979605	GORONTALO	54 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
9	Ahmed Fauzan,SH R-064539-ZI-IPAK-EA333C16AC No. HP : 82226621025	GORONTALO	48 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
10	FN R-064539-ZI-IPAK-CE453A673F No. HP : 82282088233	GORONTALO	40 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025

11	Ary Tri Widada, S.H. R-064539-ZI-IPAK-C0800584E2 No. HP : 81260339009	GORONTALO	37 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
12	Caryani R-064539-ZI-IPAK-91711A7B35 No. HP : 81261560005	GORONTALO	33 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
13	Deddy Thumannah R-064539-ZI-IPAK-ED0018C58 No. HP : 81240462242	GORONTALO	47 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
14	Sefra Bastian R-064539-ZI-IPAK-1E28E39800 No. HP : 81266272000	GORONTALO	36 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
15	EE R-064539-ZI-IPAK-7A5AE28754 No. HP : 8121000609	GORONTALO	44 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
16	Anonim R-064539-ZI-IPAK-35E8E2C806 No. HP : 082397301114	GORONTALO	42 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
17	Muhammad R-064539-ZI-IPAK-D81FE2EE42 No. HP : 08118509137	GORONTALO	38 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
18	Rahda Fatmaza Nurhamidah R-064539-ZI-IPAK-AF9E58DCA1 No. HP : 8114383502	GORONTALO	44 Tahun Laki-laki	S1 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
19	Anonim R-064539-ZI-IPAK-BAF C8B03F0 No. HP : 81343314684	GORONTALO	41 Tahun Perempuan	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
20	M F Fauziah R-064539-ZI-IPAK-6150E9A297 No. HP : 82126306631	GORONTALO	21 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
21	M F Anam R-064539-ZI-IPAK-85567C7876 No. HP : 82126306631	GORONTALO	32 Tahun Laki-laki	S2 PNS	4	4	4	4	4	5 Mei 2025
22	Ajuna Duswita R-064539-ZI-IPAK-3473F74F94 No. HP : 085397423842	GORONTALO	24 Tahun Laki-laki	S1 LAINNYA	4	4	4	4	4	2 Mei 2025
23	Yenny Maibie R-064539-ZI-IPAK-A5607E3ADF No. HP : 082292113967	GORONTALO	69 Tahun Perempuan	S1 PNS	4	4	4	4	4	28 April 2025
24	NISMAWATI MALE R-064539-ZI-IPAK-ED20F1FC20 No. HP : 081355994953	GORONTALO	33 Tahun Perempuan	Diploma 2 LAINNYA	4	4	4	4	4	23 April 2025
25	Sulmi N Badyat R-064539-ZI-IPAK-3813D013C5 No. HP : 08114312212	GORONTALO	33 Tahun Laki-laki	Diploma 3 LAINNYA	4	4	4	4	4	22 April 2025
26	Aldi Hasan R-064539-ZI-IPAK-5A529EF5A8 No. HP : 08979459155	GORONTALO	21 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	22 April 2025
27	Mohammad Arif Kadir R-064539-ZI-IPAK-BEE54647B4 No. HP : 82348765309	GORONTALO	29 Tahun Laki-laki	SMU PNS	4	4	4	4	4	21 April 2025
28	Ibrahim Pano R-064539-ZI-IPAK-018F9F320C No. HP : 082366547895	GORONTALO	33 Tahun Laki-laki	SMU TENAGA KONTRAK	4	4	4	4	4	15 April 2025
29	Lukman Nabuse R-064539-ZI-IPAK-BABBECD1E8 No. HP : 089672910302	GORONTALO	21 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	15 April 2025
30	Fikri Pangoro R-064539-ZI-IPAK-58E7F97C2C No. HP : 085158814582	GORONTALO	23 Tahun Laki-laki	SMU LAINNYA	4	4	4	4	4	15 April 2025